



BUY

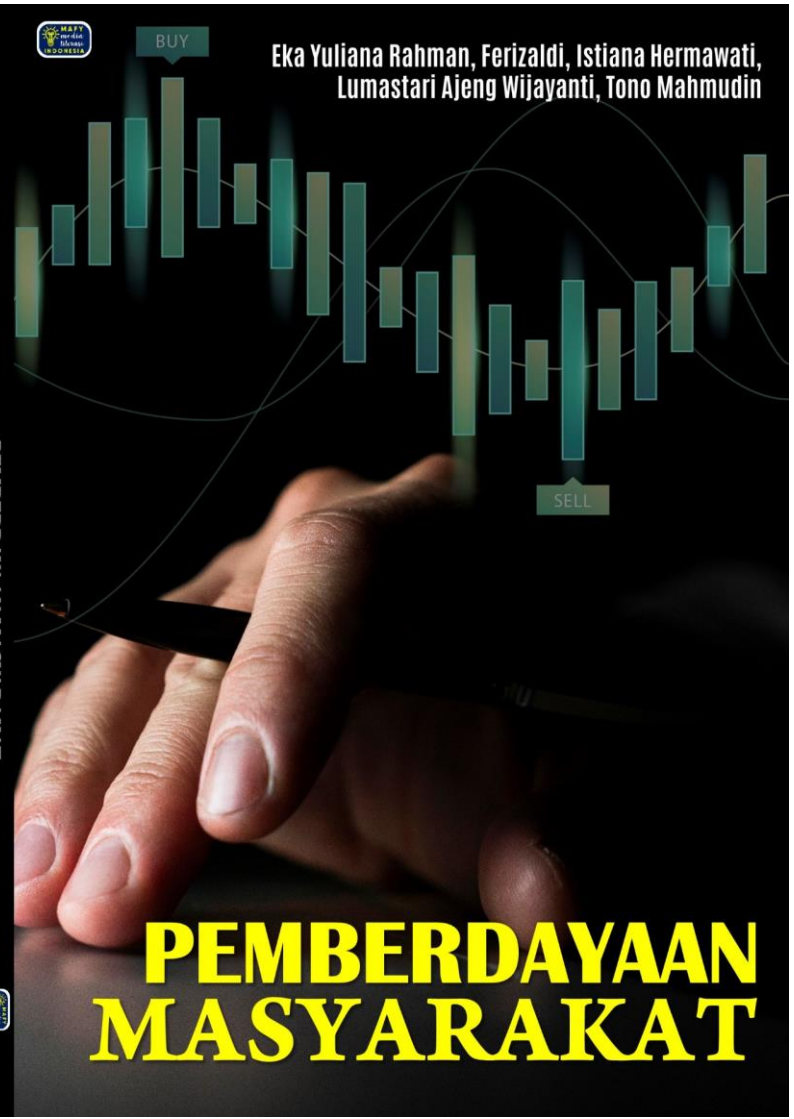
Eka Yuliana Rahman, Ferizaldi, Istiana Hermawati,  
Lumastari Ajeng Wijayanti, Tono Mahmudin

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok masyarakat diberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mempengaruhi perubahan yang diinginkan dalam masyarakat mereka.

Saat ini terminologi pengembangan masyarakat telah berkembang seiring waktu dan dapat merujuk pada beberapa hal: profesi, metode atau pendekatan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, komponen dalam layanan kemanusiaan, pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia, serta aktivitas politik. Meskipun pengembangan masyarakat menghadapi tantangan baru, pendekatan yang digunakan dalam organisasi kemanusiaan sering kali didasarkan pada konsep untuk mengembalikan nilai-nilai masa lalu.

Buku ini membahas tentang Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat hingga Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)  
Website : [penerbitmafya.com](http://penerbitmafya.com)  
FB : Penerbit Mafy



PEMBERDAYAAN  
*Masyarakat*

## UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PEMBERDAYAAN *Masyarakat*

*Eka Yuliana Rahman  
Ferizaldi  
Istiana Hermawati  
Lumastari Ajeng Wijayanti  
Tono Mahmudin*



## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Penulis:

**Eka Yuliana Rahman, Ferizaldi, Istiana Hermawati,  
Lumastari Ajeng Wijayanti dan Tono Mahmudin**

Editor:

**Andi Asari**

Desainer:

**Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Ukuran:

**viii, 126 hlm, 15,5 cm x 23 cm**

ISBN:

**978-623-8659-78-4**

Cetakan Pertama:

**Mei 2024**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang  
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA**

**ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafy.com](http://www.penerbitmafy.com)

E-mail: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)

# ***Prakata***

*Segala* puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat**. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat hingga Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 31 Mei 2024



# Daftar Isi

<b>Prakata .....</b>	<b>v</b>
----------------------	----------

## ***BAB 01· Konsep Pemberdayaan Masyarakat***

A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	4
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	6
D. Pemberdayaan Kesadaran Politik Masyarakat .....	8
E. Pemberdayaan Budaya Masyarakat.....	9
F. Pemberdayaan Masyarakat Pada Isu Lingkungan Hidup ...	10
G. Pemberdayaan Gender dalam Masyarakat.....	11
H. Pemberdayaan Pendidikan dalam masyarakat .....	13
I. Penutup .....	15

## ***BAB 02· Kemiskinan***

A. Konsep Kemiskinan.....	19
B. Teori Pengentasan Kemiskinan.....	32
C. Urgensi Pemberdayaan untuk mengatasi Kemiskinan .....	44

## ***BAB 03. Kesejahteraan Sosial: Landasan dan Implementasi***

### ***di Era Modern***

A. Pendahuluan.....	53
B. Kerangka Konseptual Kesejahteraan Sosial.....	64
C. Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.....	71
D. Isu dan Tantangan dalam Kesejahteraan Sosial.....	76
E. Penutup: Refleksi dan Pemikiran ke Depan.....	87

## ***BAB 04. Kelembagaan Masyarakat***

A. Pendahuluan.....	93
B. Pengertian.....	93
C. Fungsi dan Peran Kelembagaan.....	96
D. Kinerja Kelembagaan.....	96
E. Prinsip-prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat.....	97

## ***BAB 05. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital***

A. Peluang Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	101
B. Tantangan yang Dihadapi.....	103
C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	105
D. Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	112

<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>121</b>
------------------------------	------------

# BAB 01.

## KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

-Eka Yuliana Rahman-

### A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok masyarakat diberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mempengaruhi perubahan yang diinginkan dalam masyarakat mereka. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat atas kehidupan dan lingkungannya (Michal Lyons, 2021).

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau

kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan. (Hendrawati Hamid, 2018).

Saat ini terminologi pengembangan masyarakat telah berkembang seiring waktu dan dapat merujuk pada beberapa hal: profesi, metode atau pendekatan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, komponen dalam layanan kemanusiaan, pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia, serta aktivitas politik. Meskipun pengembangan masyarakat menghadapi tantangan baru, pendekatan yang digunakan dalam organisasi kemanusiaan sering kali didasarkan pada konsep untuk mengembalikan nilai-nilai masa lalu. Konsep tersebut menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk secara kolektif berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan sebuah masyarakat, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembangunan rasa kepemilikan terhadap kelompok, dan penghargaan terhadap sesama manusia (Zubaidi, 2013).

Di Indonesia, istilah pemberdayaan mulai dikenal pada era 1990-an oleh banyak LSM, namun baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah mulai menggunakan istilah yang sama. Seiring

berjalannya waktu, pemberdayaan telah menjadi topik yang sering dibicarakan secara publik dan bahkan sering kali dianggap sebagai kunci untuk kemajuan dan kesuksesan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan mencerminkan pendekatan pembangunan manusia yang menempatkan rakyat sebagai pusatnya, di mana proses pembangunan didorong oleh inisiatif masyarakat yang tumbuh dari bawah (Alfitri, 2011).

Saat ini pengetahuan dan praktek pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan lebih lanjut karena beberapa alasan berikut:

1. Mendorong Partisipasi Aktif. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Dengan memahami konsep pemberdayaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan masyarakat secara lebih efektif (Anwas M. Oos, 2014).
2. Mengatasi Ketidaksetaraan. Melalui pemberdayaan masyarakat, kita dapat memperkuat kapasitas individu dan kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok minoritas. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang (Faridl Widhagdha & Ediyono, 2022).
3. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Ini

membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang (Mayo, 2004).

4. Memperkuat Kemandirian Masyarakat. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat memungkinkan kita untuk mengembangkan program-program yang memperkuat kemandirian masyarakat, sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal dalam jangka panjang (Michal Lyons, 2021).
5. Meningkatkan Kualitas Program Pembangunan. Dengan memahami prinsip-prinsip dan praktik pemberdayaan masyarakat, kita dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut (Edi Suharto, 2014) konsep dasar pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu proses dan tujuan. Dalam bukunya yang berjudul "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", ia menggambarkan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kemandirian kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang diinginkan dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, dan sosial. Hal ini meliputi penghasilan,

partisipasi dalam kehidupan sosial, dan kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995) (Ahmad & Abu Talib, 2015). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, berbagai penafsiran tentang konsep pemberdayaan telah menghasilkan implementasi program yang sebaliknya melemahkan kemampuan mandiri masyarakat. Sebaliknya, program tersebut justru meningkatkan ketergantungan pada bantuan luar. Menurut (Saifuddin Yunus, 2017) ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih tidak mandiri. Namun, menurut (A.M.W. Pranarka Onny S. Prijono A.M.W. Pranarka, 1996) pemberdayaan seharusnya menguatkan individu atau masyarakat, mendorong mereka untuk memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menentukan arah hidup mereka.

Berdasarkan sejumlah argumen dapat dipahami bawah pemberdayaan bisa dianggap sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok yang lemah di masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dengan membuat masyarakat, kelompok, dan individu menjadi

cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Berikut ini penjelasan beberapa konsep pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek manfaat.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan, terutama yang berada di tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal, nasional, dan global (John P. Blair, 2016).

Merujuk pendapat (George Psacharopoulos, 2010), konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, pendidikan keuangan, dan transfer teknologi.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu melibatkan akses terhadap sumber daya. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan teknologi. Hal ini membantu mengurangi ketidaksetaraan

ekonomi dan meningkatkan peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Hernando De Soto, 2012). Salah satu akses dan penguatan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat di misalnya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ini melibatkan dukungan dalam hal akses terhadap pasar, pendanaan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberlangsungan usaha kecil dan menengah.

Manfaat dari penguatan akses sumber daya ekonomi ini dapat berdampak positif pada partisipasi dalam pasar yang kompetitif. Hal ini bermakna partisipasi masyarakat dalam pasar ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pengambil keputusan ekonomi dapat diberdayakan secara maksimal. Misalnya dapat dilakukan melalui penguatan koperasi, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan untuk perdagangan adil. Perlu ditekankan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sebagaimana dijelaskan oleh (A. Zen, 1999) mencakup upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, di mana keuntungan dan sumber daya didistribusikan secara merata di antara semua anggota masyarakat. Konsep-konsep tersebut memberikan landasan bagi strategi dan praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, pihak terkait dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

## **D. Pemberdayaan Kesadaran Politik Masyarakat**

(Norris, 2011) dalam bukunya yang terkenal "*Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited.*" menjelaskan secara lugas bahwa pemberdayaan kesadaran politik masyarakat merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan pengaruh masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan Politik bagi masyarakat melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem politik, hak-hak politik mereka, dan isu-isu politik yang relevan. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal.

Secara umum partisipasi dalam proses politik ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan pengambilan keputusan publik. Selain juga perlu memahami hak dan kewajiban kewarganegaraan yang melekat pada regulasi di sebuah negara atau wilayah. Pemberdayaan kesadaran politik masyarakat berfokus pada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pemerintahan setempat (VERBA *et al.*, 1995).

Aspek lainya terkait pemberdayaan kesadaran politik masyarakat melibatkan pembangunan keterampilan dan strategi advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan tindakan pemerintah. Ini melibatkan pembelajaran tentang cara-cara untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan memengaruhi proses keputusan politik yang dilaksanakan secara terorganisir dalam suatu organisasi politik.

Melibatkan partisipasi dalam organisasi politik dan sosial yang memiliki kepentingan serupa, dapat membantu dalam memobilisasi dukungan untuk tujuan politik tertentu dan memperkuat pengaruh masyarakat dalam proses politik. Konsep-konsep pemberdayaan kesadaran politik masyarakat dalam praktiknya di tengah masyarakat dapat menjadi lebih sadar politik serta terlibat secara aktif dalam proses politik, dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

## **E. Pemberdayaan Budaya Masyarakat**

Kita pernah mendengar tujuan pemberdayaan budaya dari seorang Antropolog Koentjaraningrat. Dia menjelaskan pemberdayaan kebudayaan bagi masyarakat di Indonesia bertujuan untuk mengakui, memperkuat, dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai sumber daya untuk pembangunan dan pemberdayaan budaya bangsa. Setidaknya pada pengakuan nilai dan warisan budaya mencakup upaya untuk memahami, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya yang ada dalam masyarakat.

Dimensi lainnya pemberdayaan budaya juga melibatkan pengembangan ekonomi berbasis budaya, di mana kekayaan budaya lokal dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pariwisata budaya, kerajinan lokal, seni pertunjukan, dan industri kreatif lainnya (R.M.Soedarsono, 1999). Pada perkembangan terkini, aspek penguatan budaya lokal di Indonesia dipandang perlu untuk dikelola sebagai upaya pemajuan kebudayaan. Misalnya

penguatan identitas dan jati diri. Konsep ini menekankan pentingnya penguatan identitas dan jati diri masyarakat melalui pemberdayaan budaya. Dengan memahami dan menghargai warisan budaya mereka, masyarakat dapat merasa lebih bangga dan terhubung dengan akar budaya mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa memiliki dan kohesi sosial.

## **F. Pemberdayaan Masyarakat pada Isu Lingkungan Hidup**

Pemberdayaan masyarakat terhadap alam sekitar atau lingkungan hidup merupakan konsep yang bertujuan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam pelestarian, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan hidup mereka. Selanjutnya terdapat pertanyaan yaitu bentuk kongkrit apa yang bisa diterapkan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat? Saya memilih pendidikan lingkungan sebagai salah satu aspek penting bagi pemberdayaan masyarakat. Mengingat dampak dari kerusakan alam saat ini menjadi isu besar global, sehingga pendidikan lingkungan memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah lingkungan dan tindakan yang dapat mereka ambil untuk melindungi alam sekitar.

Selain itu perlu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ramah lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, air, dan tanah melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam

(Palapa, 2018). Tentunya selain adanya pengelolaan bersama pada (SDA) kiranya perlu untuk pengembangan keterampilan dan teknologi ramah lingkungan. Kosenp ini dapat membantu mereka mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Termasuk penggunaan energi terbarukan, teknik pertanian organik, dan pengelolaan limbah yang efisien.

Dari uraian di atas menunjukkan bawah isu pelestarian alam menjadi prioritas. Dengan demikian masyarakat dapat diberdayakan melalui advokasi dan aksi sosial untuk melindungi lingkungan mereka dari kerusakan dan degradasi. Setidaknya melibatkan pembentukan kelompok advokasi lingkungan, kampanye kesadaran, dan tindakan langsung untuk mempromosikan kebijakan lingkungan yang lebih baik.

Advoasi lingkungan dapat dimaknai sebagai penguatan budaya peduli lingkungan, di mana nilai-nilai keberlanjutan, konservasi, dan harmoni dengan alam ditanamkan dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapkan konsep pemberdayaan masyarakat terhadap alam sekitar dan lingkungan, dapat memobilisasi potensi kolektif masyarakat untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama.

## **G. Pemberdayaan Gender dalam Masyarakat**

Dalam pembangunan manusia, perhatian terhadap kesenjangan dan kesetaraan gender menjadi sangat penting. Kesenjangan gender merujuk pada ketidaksetaraan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh faktor budaya, sistem, dan struktur sosial. Sementara itu, kesetaraan gender

merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama secara adil. Kesetaraan gender terwujud ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dan ketika pembagian dan peran sosial keduanya berjalan seimbang dan harmonis (Diana, 2018).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini merupakan kenyataan meskipun ada kemajuan yang cukup signifikan dalam mencapai kesetaraan gender. Karakteristik dan tingkat diskriminasi bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender tetap terlihat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kekuasaan, partisipasi politik, dan bidang lainnya. Perempuan sering kali mengalami dampak yang paling terasa dari kesenjangan gender, seperti risiko kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, rentan terhadap kekerasan, dan menghadapi beban ganda dalam tugas rumah tangga. Perempuan adalah yang paling terbebani oleh ketidaksetaraan yang masih berlangsung. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan inti dari tujuan pembangunan yang memiliki nilai dan urgensi yang sangat penting (Siska Nadia, 2022).

Dengan demikian, pemberdayaan gender dalam masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan peran, partisipasi, dan aksesibilitas terhadap sumber daya bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Penghormatan, penagkuan dan kesetaraan mencakup pada bidang Pendidikan yaitu memberikan akses yang sama terhadap bagi laki-laki dan perempuan, serta

menghilangkan stereotip gender dalam kurikulum dan lingkungan belajar.

Demikian juga bidang ekonomi, memastikan kesempatan yang setara dalam hal pekerjaan, gaji yang adil, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan dukungan untuk pengembangan usaha perempuan. Hal ini juga berlaku untuk partisipasi politik, yaitu mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses politik, termasuk pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan representasi dalam lembaga-lembaga politik.

Dalam bidang kesehatan juga terkait untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang aman dan layak, serta memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh dan kesehatannya sendiri. Sejumlah bidang-bidang tersebut bertujuan untuk menjegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan dukungan kepada korban kekerasan.

## **H. Pemberdayaan Pendidikan dalam Masyarakat**

Masalah dalam bidang pendidikan tidak dapat diselesaikan semata oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat, termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat secara luas, untuk mengatasi tantangan pendidikan inklusif dan pelaksanaan program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan finansial, tetapi juga melibatkan kontribusi pemikiran dan sumber daya manusia (Sukmawati, 2018).

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan. Di antaranya partisipasi orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak-anak di rumah serta mendukung proses belajar di sekolah. Ini dapat mencakup dukungan dalam hal membantu tugas-tugas sekolah, mengikuti perkembangan pendidikan anak, dan berkomunikasi dengan guru.

Setelah mengambil peran mendidik di lingkungan keluarga, aspek selanjutnya yaitu pelibatan peran masyarakat dalam Sekolah. Seperti komite sekolah, kegiatan sukarela, dan kerja sama dengan pihak sekolah dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal (Irawan *et al.*, 2021). Langkah ini disusul dengan pemberdayaan untuk keterlibatan Komunitas Lokal dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, penyediaan akses transportasi bagi siswa, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pengalaman belajar siswa.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan masyarakat bidang Pendidikan ini beroreintasi pada memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung mutu pendidikan, seperti melalui pelatihan orang tua, program literasi, dan workshop pengembangan keterampilan bagi para pendidik dan pengelola sekolah agar tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

## **I. Penutup**

Pemberdayaan masyarakat memiliki banyak konsep dan dimensi, termasuk pemberdayaan ekonomi, politik, budaya, lingkungan, gender, dan pendidikan. Setiap konsep pemberdayaan ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, tetapi secara keseluruhan, mereka bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, mengatasi ketidaksetaraan, mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat kemandirian masyarakat, meningkatkan kualitas program pembangunan, dan membangun hubungan yang kuat dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep tertentu, seperti pengembangan keterampilan ekonomi, peningkatan kesadaran politik, penguatan budaya lokal, perlindungan lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan peran aktif dalam pendidikan. Dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai dimensi dan konsep-konsep ini, diharapkan dapat tercapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat.

# Daftar Pustaka

- A Zen. (1999). *Developments as Freedom*. Oxford University Press.
- Ahmad, M. S., & Abu Talib, N. Bt. (2015). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. *Quality & Quantity*, 49(2), 827–838. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0025-8>
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- A.M.W. Pranarka Onny S. Prijono A.M.W. Pranarka. (1996). *Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi. entre for Strategicand International Studies (CSIS)*.
- Anwas M. Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta.
- Diana. (2018). Analisis Pemberdayaan Gender di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1).
- Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. PT. Refika Aditama.
- Faridl Widhagdha, M., & Ediyono, S. (2022). Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 1(1), 71–76. <https://doi.org/10.55381/ijsrr.v1i1.19>
- George Psacharopoulos. (2010). Skills for Employability, Economic Growth and Innovation: Monitoring the Relevance of Education and Training Systems. *European Expert Network on Economics of Education (EENEE)*.
- Hendrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.

- Hernando De Soto. (2012). *The Mystery of Capital*. Basic Books.
- Irawan, E., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta. *JIPSINDO*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>
- John P. Blair, M. C. C. (2016). *Local Economic Development: Analysis, Practices, and Globalization* (2nd ed.). SAGE Publication.
- Mayo, M. (2004). Exclusion, Inclusion and Empowerment: Community Empowerment? Reflecting on the Lessons of Strategies to Promote Empowerment. In *The Politics of Inclusion and Empowerment* (pp. 139–158). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9781403990013\\_9](https://doi.org/10.1057/9781403990013_9)
- Michal Lyons, C. S. and A. S. (2021). Participation, Empowerment and Sustainability: (How) Do the Links Work. *Urban Studies*, 38(8).
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Harvard University Press.
- Palapa, T. M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Sda) Hutan di Sekitar Gunung Lolombulan. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(1). <https://doi.org/10.36412/abdimas.v11i1.553>
- R.M.Soedarsono. (1999). *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi .
- Saifuddin Yunus. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.
- Siska Nadia. (2022, December). Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/pemberdayaan-perempuan-untuk-kesetaraan.html>.

- Sukmawati. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Dunia Pendidikan. *Ash-Shahabah*, 4(1).
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality*. Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7>
- Zubaidi. (2013). Pemberdayaan Masyarakat: Wacana dan Praktek. Kencana.

# BAB 02.

## KEMISKINAN

*-Ferizaldi-*

### **A. Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan fenomena atau permasalahan yang menjadi isu strategis di berbagai negara dan telah menjadi masalah sosial yang bersifat global dan menjadi isu strategis dalam arena pemerintahan. Hampir tidak ditemui adanya negara yang terbebas dari fenomena kemiskinan, tetapi tingkat keparahan atau populasinya saja yang berbeda, ada yang persentase tinggi atau ada juga yang rendah. Dalam Negara Indonesia kajian mengenai kemiskinan sudah banyak diperbincangkan oleh para ahli, mulai dari definisi kemiskinan, faktor penyebabnya hingga bagaimana cara menanggulangi kemiskinan.

Adapun pengertian dari kemiskinan sangatlah beragam, salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Emil Salim

(Prayitno, H., Arsyad. L, 1987), yang menyatakan bahwa “kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain”.

Pandangan ini juga dikuatkan kembali oleh Emil Salim, (Bloom & Reenen, 2020) yang mendeskripsikan kemiskinan dengan kondisi kekurangan barang-barang (*goods*) dan pelayanan (*services*) yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”. Standar hidup yang layak tersebut berbeda-beda yang kemudian dirumuskan secara konseptual oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berkaitan dengan standar hidup dalam mendefinisikan kemiskinan maka Suparlan menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai keadaan pada suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya adalah keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Aspek tersebut dapat juga dijadikan barometer untuk melihat penyebab kemiskinan, atau dalam hal ini bisa disebut sebagai aspek internal dan eksternal (Suparlan, 2000).

Untuk dapat mengkatagorikan apakah seseorang dikatakan miskin atau tidak dapat dilihat dari keberadaan fisik harta benda atau juga penguasaan sumber mata pencaharian, atau juga berarti

tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Dengan demikian kemiskinan itu dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada kondisi masyarakat tertentu standard kehidupan tidaklah sama, sehingga kita tidak bisa melakukan penyeragaman indikator untuk melihat kemiskinan, tetapi harus melihat dalam perspektif lokal atau kondisi faktual.

Berkaitan dengan itu Mardimin (1996) menerangkan pengertian Kemiskinan sebagai keadaan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan tentang yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Sehingga dengan adanya pengertian kemiskinan ini maka dapat diterjemahkan apa sebenarnya kemiskinan itu, sehingga kemiskinan menurut Mardimin adalah sebagai berikut:

1. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan
2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”.

Di samping itu, Mardimin juga menerangkan bahwa terdapat beberapa Jenis Kemiskinan, seperti:

1. Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah.
3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.
4. Kemiskinan Sitisional atau Kemiskinan Natural. Kemiskinan situsional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
5. Kemiskinan Kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin (Mardimin, 1996).

Terlepas dari pengertiannya, sebagaimana yang disebutkan di atas, ternyata fenomena kemiskinan di Indonesia sangat beragam. Kondisi kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia sangat beragam, jika di pulau Jawa masyarakat yang hidup di rumah yang berlantai tanah saja dianggap miskin, namun kondisi tersebut amat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di Papua atau di pedalaman Kepulauan Mentawai, walaupun kondisi rumah dan infrastruktur kehidupan menurut kita tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin tetapi belum tentu menurut mereka, karena ada indikator lain yang dianggap sebagai penunjuk masarakat miskin, misalnya jumlah kepemilikan hewan

ternak, penguasaan tanah, atau indikator lain yang sesuai dan diakui oleh masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Bank Dunia, mengemukakan terdapat tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, yaitu

1. Banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan AS\$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan cirri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (Nurwati, 2008).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), menyatakan Rumah tangga dapat dikatakan miskin apabila terdapat minimal 9 (sembilan) variabel terpenuhi dalam 14 Kriteria kemiskinan yang dipersyaratkan, yaitu

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kriteria-kriteria tersebut berkaitan erat dengan penyebab kemiskinan itu sendiri, kemiskinan itu tidak lahir dengan sendirinya melainkan ada beberapa faktor penyebabnya, baik secara internal maupun eksternal, Dalam hal ini Suharto (2009)

mengemukakan penyebab kemiskinan itu ada empat faktor, yaitu

1. Faktor individual, terkait dengan kondisi fisik dan psikologis seseorang. Orang menjadi miskin karena disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial, terkait dengan kondisi lingkungan sosial yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Seperti, diskriminasi berdasarkan usia, gender, dan etnis.
3. Faktor kultural, terkait dengan kondisi budaya yang menyebabkan kemiskinan, yaitu kebiasaan hidup.
4. Faktor struktural, terkait dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible* sebagai pemicu orang menjadi miskin (Suharto, 2009).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu timbul karena ada penyebabnya, baik yang disebabkan oleh faktor Individu itu sendiri atau faktor internal maupun faktor alam atau eksternal dan faktor pemerintahan atau politik pemerintahannya. Walaupun kemiskinan itu banyak penyebabnya namun kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan publik atau strategi yang terukur.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hardiman dan Midgley (Kuncoro, 1997). Menyebutkan banyak penyebab kemiskinan . Kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II sebagai akar masalahnya ditengarai adalah pada sebab keterbelakangan dari perekonomian

negara tersebut. Keterbelakangan dari berbagai hal baik teknologi maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penduduk atau masyarakat negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Demikian juga pendapat Sharp, *et al.*, (Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

*Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan berkualitas rendah, sumber daya disini dimaksudkan sebagai lahan pertanian atau pertambangan.

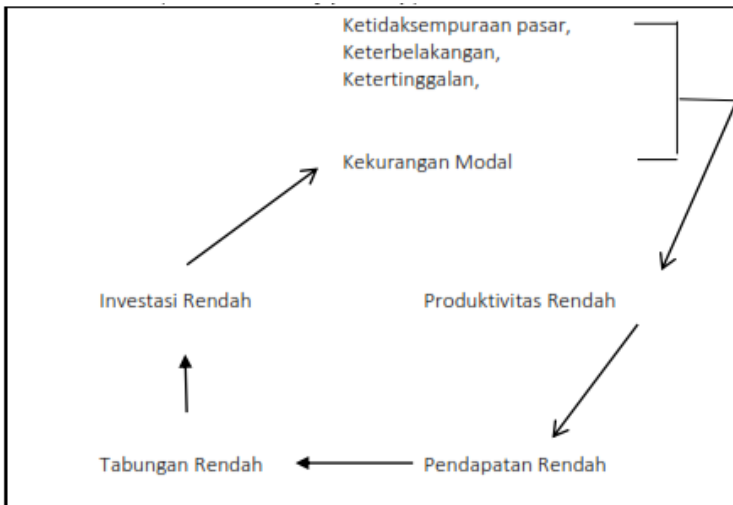
*Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan, kondisi demikian sebagai dampak sistemik dari kualitas sumber daya manusia.

*Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Modal kerja merupakan stimulus utama untuk produktivitas warga, di negara-negara kapitalis akses perbankan lebih dominan dikuasai oleh kaum bangsawan dan berketurunan baik, sementara di negara berkembang akses permodalan

sangatlah sulit, bahkan masyarakat sering terimbas dengan suku bunga yang tinggi, yang mengakibatkan laju produktivitas melemah.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (Kuncoro, 1997) kemiskinan disebabkan adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya, seperti siklus yang tidak akan berhenti, hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

### Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse



Dikutip dalam Kuncoro, (1997:132)

Negara-negara berkembang sampai saat ini, masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya untuk menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Oleh sebab itu, Soetrisno (Soetrisno, 1995) melihat penyebab kemiskinan dari sisi pembangunan, beliau menguraikan bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara, atau sistem ekonominya, menjadi pemicu kemiskinan itu.

Selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan pemaparan dan telaah yang dilakukan oleh Darwin (2005) menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat empat faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi, meliputi kultural, structural, konflik social dan bencana alam, secara lengkap beliau menerangkannya sebagai berikut:

### **1. Faktor Budaya (*Cultural Factor*)**

Faktor ini sering juga disebut berasal dari dalam atau dari individu itu sendiri yang menyangkut kebiasaannya. Atau juga disebut berasal dari dalam diri orang atau masyarakat

miskin itu sendiri. Pendapat ini disampaikan oleh penganut konservatif yang menyebutkan bahwa orang dalam keadaan miskin karena jebakan budayanya sendiri, yang kemudian diwariskan secara turun temurun. Budaya hidup miskin dianggap sebagai produk sosial kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang koersif di mana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Watak malas, orientasi hidup yang hanya berdasarkan kebutuhan pragmatis dan cenderung mengabaikan masa depan, kemanjaan terhadap lingkungan akibat suburnya lahan sehingga merasa tak perlu kerja keras karena memang sumber penghidupan dapat dengan mudah diperoleh, merupakan sebagian dari faktor-faktor yang kemudian membentuk budaya dan menjebak mereka dalam kondisi hidup miskin.

## **2. Faktor Struktural (*Structural Factor*)**

Menurut structural faktor, timbulnya masyarakat miskin sebagai residu dari kebijakan negara. Berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan, atau mendegradasi fungsi ekonomi mereka dan merampas sumber daya yang mereka kuasai. Pandangan ini beranggapan bahwa negara pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari kalangan kapitalis yang selanjutnya membentuk dan melanggengkan "*capital culture*" milik para kapitalis. Kebijakan politik dan ekonomi dari negara akan selalu menunjukkan keberpihakannya pada kelompok kepentingan yang

direpresentasikan secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar mengesampingkan kepentingan masyarakat miskin. Keberadaan masyarakat miskin sudah pasti akan tergilas oleh kebijakan negara. Perkembangan masyarakat menuju ke sistem yang dihegemoni oleh kekuatan modal akan menjadikan kelompok miskin semakin terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan struktural juga dapat merupakan produk dari sistem sosial, ekonomi dan politik yang hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi hanya oleh segelintir elit ekonomi. Sistem politik yang represif memberi ruang yang terbatas kepada penduduk miskin untuk mengambil peran dalam proses-proses politik dan memperjuangkan kepentingannya. Sistem sosial demikian juga dapat berkembang ke arah yang bersifat memarginalkan kelompok sosial tertentu. Di sisi yang lain negara juga tidak memberikan keberpihakan yang kuat kepada kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalkan, atau pada tingkat tertentu ikut melanggengkan nilai-nilai sosial yang eksploitatif dan diskriminatif. Dalam hal ini, meskipun daya kritis masyarakat terhadap kebijakan negara semakin tinggi utamanya berkaitan dengan hak-hak hidup mereka yang kian tergusur oleh kebijakan negara atau ekspansi kapitalis, pemerintah dengan berbagai instrumennya selalu saja bersifat defensif dan bahkan ofensif terhadap kekuatan yang kritis, bahkan membungkamnya.

### **3. Konflik Sosial Politik atau Perang (*Social Politic Factor*)**

Sebahagian besar negara-negara dunia ketiga yang bergelut dengan kemiskinan tidak terlepas dari konflik sosial dan politik yang terjadi di berbagai daerahnya, hal ini juga berlaku di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya produktivitas masyarakat termasuk bukan hanya enggan para investor untuk melabuhkan modalnya melainkan juga terjadi pelarian modal ke luar negeri. Akibatnya lapangan kerja terbatas, dan pengangguran meningkat yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja.

### **4. Faktor Alam (*Natural Factor*)**

Alam di samping memberikan kemakmuran bagi manusia ada juga yang menyebabkan manusia terdegradasi. Ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan kondisi alamnya, melainkan cara manusia beradaptasi dengan alam yang kurang maksimal menimbulkan kemiskinan. Dilihat secara fisik, ekologi maka terdapat tiga jenis kondisi Alam sebagai penyebab kemiskinan alamiah, yaitu

- a. Kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki sumber alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, serta keterisolasian wilayah pemukiman penduduk.
- b. Bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi dan wabah penyakit baik menyerang manusia maupun sumber mata pencaharian penduduk.

- c. Kondisi fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi (Darwin, 2005).

Secara sederhana *Chamber* (Soetomo, 1995) justru menyederhanakan penyebab kemiskinan. Menurut Chamber, kemiskinan hanya dapat disebabkan antara lain oleh kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan akhirnya ketidakberdayaan sehingga mendorong proses kemiskinan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan berbagai pendekatan alam perspektif teori tersebut, dapat dilihat berbagai penyebab kemiskinan yang akan dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan bukan merupakan upaya yang bersifat tambal sulam, melainkan sebuah upaya komprehensif yang didasarkan pada keadaan masyarakat, hal ini perlu dilihat agar upaya penanggulangan kemiskinan berhasil tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di suatu daerah.

Kondisi atau karakteristik masyarakat miskin selalu identik dengan keadaan ekologisnya, seperti bentang alam, struktur kemasyarakatan (adat istiadat) kemudian kebijakan pemerintah, yang ketiga aspek tersebut saling terkait satu sama lainnya. Sehingga pengentasan kemiskinan harus melihat kepada lingkungan ekologis tersebut sebagai pemicunya dan sekaligus target dari perubahan yang dilakukan.

## **B. Teori Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah upaya yang sistematis dan terukur dan bersifat penting dilakukan oleh

pemerintah di berbagai negara. Hal ini dikarenakan peningkatan angka kemiskinan akan mempengaruhi kinerja pemerintah dan akan menimbulkan kerawanan sosial bahkan akan berdampak kepada penurunan kredibilitas penyelenggara birokrasi pemerintahan, untuk itu diperlukan berbagai upaya yang akan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan, upaya-upaya tersebut bisa mengadopsi berbagai pendekatan teori-teori yang sudah ada, di antara teori-teori mengenai penanggulangan kemiskinan tersebut di antaranya adalah:

### **1. Konsep Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial**

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada, disamping merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki dampak akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, sehingga lahirlah berbagai konsep dan strategi penanganan kemiskinan yang dirumuskan para ahli untuk menangani persoalan kemiskinan tersebut.

Keberadaan dari berbagai pendekatan dan strategi tersebut, telah memberikan kontribusi positif pada pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi persoalan kemiskinan, sebagaimana Indonesia misalnya telah berupaya mencoba berbagai formula dari mulai program transmigrasi, keluarga berencana di era orde lama dan orde baru, kemudian dilanjutkan dengan BLT dan subsidi Pupuk serta bantuan nelayan di era reformasi, sampai kepada Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak ada sebuah keberhasilan yang

signifikan dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan literatur yang ditemukan, terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Setidaknya terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-liberal dan sosial demokrat yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural dan individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan, menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave, (Roostartina, 2013) bahwa penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan sebagai berikut:

<b>PRADIGMA</b>	<b>Neo-Liberal</b>	<b>Demokrasi-Sosial</b>
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsep dan indikator kemiskinan	Kemiskinan absolut	Kemiskinan relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; Lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh).	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	-Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. -Memberi pelatihan keterampilan	-Penyaluran pendapatan secara universal -Perubahan fundamental dalam pola-pola

	<p>pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM.</p>	<p>pendistribusian pendapatan melalui negara dan kebijakan sosial.</p>
--	---	--

Sumber: Cheyne, O'Brien dan Belgrave, dalam Roostartina, E (2013)

Teori Neoliberal ini berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu (*individual freedom*). Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *the Wealth of Nation* tahun 1776, dan *Frederick Hayek, The Road to Serfdom* di tahun 1944, dan dipandang sebagai rujukan kaum neoliberal yang mengedepankan asas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998) disebut sebagai ide yang mengunggulkan “mekanisme pasar bebas” dan mengusulkan “*the almost complete absence of state’s intervention in the economy*”. Atau hampir tidak adanya intervensi negara dalam perekonomian.

Pada pokoknya para pendukung teori neoliberal beranggapan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, konsep penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya

melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan.

Dalam teori ini peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang baru boleh ikut campur ketika lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker, 1995; Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program struktural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), di beberapa negara merupakan contoh konkrit dari implementasi teori neoliberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Tetapi jika dilihat secara seksama program-program struktural adjustment tersebut masih bersifat pencegahan saja alias tambal sulam, sehingga belum menjawab permasalahan yang substansi, atau tidak paripurna dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Bertolak belakang dengan Teori Neoliberal, justru Teori Demokrasi Sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan. Teori Demokrasi Sosial menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial untuk seluruh warga negara. Meskipun teori ini tidak anti sistem ekonomi kapitalis, tetapi merasa perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya, artinya kehadiran negara harus nyata dalam berbagai program yang dibuat.

Teori ini yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran, muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai hantu. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. *“The welfare state acts as the human face of capitalism,”* demikian menurut Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998 (Febrianti, 2017). Intinya mereka menekankan perlunya kesetaraan dalam negara.

Pendukung pandangan sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar, melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan kehidupan manusia.

Dengan kata lain, kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat

berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neoliberal memandang bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, pendukung sosial demokrat meyakini bahwa penanggulangan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan.

Jika kaum neoliberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, namun kaum sosial demokrat

justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Resiprokal antara teori neoliberal dan sosial demokrat berakar pada makna kebebasan. Dewasa ini isu-isu kebebasan semakin kuat bergema seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan dunia dari MDGS ke SDGS yang terkenal dengan 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership*) di mana pada hakikatnya kebebasan sebagai pilar utama dalam pembangunan setiap negara.

## **2. Teori Pemberdayaan**

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah Pemberdayaan masyarakat, karena pendekatan pemberdayaan berbasis kepada aspek lokal, bukan mengeneralisasikan definisi dan konsep bahkan solusi, tetapi pemberdayaan justru terjadi penyesuaian antara penyebab dan solusi yang ditawarkan, sehingga lebih konfrehensif, dengan demikian capaian dari solusi yang diberikan akan kuat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Secara teoritis, Parsons (Sukmawati *et al.*, 2014), menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk melakukan partisipasi dalam pelbagai pengawalan dan mempengaruhi kepada berbagai pengaruh. Pemberdayaan menunjukkan suatu keadaan, memperoleh keahlian, pengetahuan dan kekuasaan yang memadai untuk memberi pengaruh kepada kehidupannya

dan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Berkaitan dengan itu, maka untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

a. Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

b. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar, Saling berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya (Karsidi, 2007).

Adapun contoh penanggulangan kemiskinan model pemberdayaan masyarakat di Indonesia adalah program Gerdu Kampling di Semarang, program PNPM Mandiri, dan BKPG di Aceh. PNPM Mandiri menekankan pada pemberian stimulus dari pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan yang dirumuskan bersama untuk memecahkan masalah kemiskinan. Sedangkan Bantuan Keuangan Peumamkmu Gampong (BKPG) di Provinsi Aceh lebih berorientasi kepada insentif *finansial* untuk mendong-

krak sektor ekonomi mikro masyarakat, diharapkan dengan penguatan ekonomi mikro masyarakat dapat mandiri dan terbebas dari lingkaran kemiskinan.

### 3. Teori Modal Sosial

Paull Saffer (2008) menjelaskan mengenai telah terjadinya perluasan konsep kemiskinan dari konsep fisiologis kepada Pendekatan kebutuhan utama manusia (*basic human need*), sehingga penanggulangan kemiskinan berdasarkan pendekatan *basic human needs* tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) modal (*capital*), yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Modal Manusia (*Human Capital*): Peningkatan pendidikan hingga tamat SMU, Kesehatan, dan gizi makanan.
- b. Pendekatan Modal Sosial (*Social Capital*): Organisasi sosial, pertemanan, jaringan kerja, kepercayaan, dan resiprositi.
- c. Pendekatan Modal Ekonomi (*Economic Capital*): Tanah, tenaga kerja, dan modal.
- d. Pendekatan Modal Politik (*Political Capital*): Jaringan dengan organisasi politik formal dan informal, dan keanggotaan dalam organisasi politik formal dan informal.
- e. Pendekatan Modal Budaya (*Cultural Capital*): Norma sosial, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
- f. Pendekatan Modal Paksaan (*Coercive Capital*): Sumber-sumber kekerasan, intimidasi, dan kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkuat norma sosial dan memelihara hubungan sosial.
- g. Pendekatan Modal Alam (*Natural Capital*): Jumlah dan

kualitas ketersediaan sumber daya alam, dan pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam (Shaffer, 2008).

Saffer berpandangan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari intinya, yaitu dengan memperhatikan tujuh kekuatan dari komunitas manusia sebagai intinya yang berfungsi sebagai stimulus bagi perubahan sektor lainnya, berbeda dengan pendekatan secara teoritis tersebut, maka pendekatan yang diambil oleh Bappenas untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan integrasi program kemiskinan, seperti pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (*life-cycle*), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat *single targeting framework* untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.

Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (*cash for work*) untuk masyarakat kurang mampu. Pendekatan yang dibuat oleh Bappenas R.I diarahkan kepada integrasi program - program penanggulangan kemiskinan.

Saat ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ditempuh melalui pembentukan lembaga penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

lembaga ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

### **C. Urgensi Pemberdayaan untuk Mengatasi Kemiskinan**

Konsep pemberdayaan masyarakat miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan, karena bisa jadi pemerintah juga ikut andil dalam menciptakan kemiskinan, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sukamdi (Palikhah, 2017) bahwa Pemerintah juga turut menyebabkan kemiskinan kultural itu tumbuh subur di mana kemiskinan sosial-budaya diciptakan sendiri oleh pemerintah, atau kebijakan pemerintahlah sebagai pemicu timbulnya kemiskinan, contohnya ketika krisis global melanda Indonesia pada tahun 1997-1999. Pemerintah ketika itu membuat kebijakan program jaring pengaman sosial (*social*

*security net*) yang tujuannya semula untuk membantu orang-orang miskin. Akan tetapi ternyata bantuan itu malah membuat mereka menjadi tergantung, dan memunculkan kondisi bahwa *'poor was a blessing, because by being poor, they could receive money. If they were not poor, they had to work hard to convince others that they were poor'* (miskin adalah berkah, karena dengan menjadi miskin, mereka dapat menerima uang. Jika mereka tidak miskin, mereka harus bekerja keras untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka miskin) kondisi ini akan melahirkan budaya malas atau kurang inovatif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan demikian sangat diperlukan pendekatan-pendekatan yang bersifat politik dan kultural yang berasal dari karakteristik lokal daerah setempat.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme dari atas-bawah (*top-down*). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan/mendengarkan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Pengentasan orang miskin, bukanlah menghendaki pertumbuhan lebih, melainkan evaluasi yang lebih cermat atas dampak kebijakan dari distribusi kekayaan dan kemiskinan yang diakibatkannya. Ia menghendaki sesuatu yang lebih ketimbang hiperaktivitas bisnis manipulatif dari tekad palsu untuk mengurangi kemiskinan (J Seabrook, 2006), lebih lanjut Seabrook mengikhtisarkan karyanya yang terkenal mengenai makna kemiskinan, berdasarkan pengalaman orang miskin itu sendiri, baik di negara maju maupun negara miskin. Hipotesisnya menyatakan bagaimana bangunan kapitalisme hanya mungkin berdiri di atas kesengsaraan orang miskin. Karena itu, program apa pun yang dibuat oleh pemerintah, seperti konsep MDGs, mustahil bisa mengentaskan orang miskin, selama masih bertumpu pada sistem kapitalis. maka dari itu penulis yakin strategi pemberdayaan dipandang lebih realistis dari pada strategi politis birokratis.

Korelasi positif antara pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat ditempuh dengan berbagai program yang memberikan akses lebih ke komunitas lokal untuk terlibat langsung dalam formulasi kebijakan pengentasan

kemiskinan sampai pada fase implementasinya, dengan demikian diagnosa permasalahan kemiskinan bukan di tataran elit, melainkan masyarakat miskin itu sendiri dan selanjutnya merekalah yang akan mencari solusi berdasarkan kekuatan modal sosial yang dimiliki, peran pemerintah disini sebagai fasilitator dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, sehingga tidak akan terjadi penyeragaman sebagaimana yang terjadi sekarang, melainkan solusi kemiskinan disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Saat ini sebaiknya memperhatikan penguatan kembali kearifan lokal yang sudah ada menjadi entitas kultur lokal, menjadi *core* utama atau penggerak utama dalam upaya pengentasan kemiskinan (Ferizaldi, 2022).

Saat ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara berkembang justru melahirkan kemiskinan struktural, di mana pembukaan akses jalan untuk tujuan membuka keterisoliran wilayah justru berdampak sebaliknya, menjadikan masyarakat menjadi tergantung kepada kawasan perkotaan yang secara fakta sangat mengiurkan akan berbagai fasilitasnya dan akhirnya kawasan perkotaan akan semakin padat akibat mudahnya migrasi dari kawasan perdesaan, dampaknya bagi kawasan perdesaan adalah mereka akan kekurangan sumber daya manusia yang produktif untuk pertanian, maka kelangkaan pangan tidak dapat dihindari lagi, dampak selanjutnya tanah-tanah produktif yang menganggur akan berpindahtangan ke pengusaha dan pada akhirnya petani kembali menjadi masyarakat miskin di negerinya sendiri.

Keadaan demikian sejalan dengan konsep dari teori ketergantungan sebagaimana disebutkan oleh Arief Budiman bahwa terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga yaitu dari pembagian kerja internasional yang amat eksploitatif, sehingga melahirkan kolonialisme dan imperialisme (Kartono & Nurcholis, 2016). Oleh sebab itu pembangunan masyarakat di kawasan perdesaan harus dirubah dari paradigma melepaskan keterisoliran menjadi kemandirian lokal, melalui penyediaan dan pemenuhan akses ke insfrastuktur dasar di desa seperti pendidikan, kesehatan, pasar dan hiburan, konsep demikian dapat ditempuh dengan pemberdayaan masyarakat tanpa harus mengubah pola hidup dan struktur sosialnya, sehingga dampak negatif dari migrasi ke kota dapat diatasi serta menurunkan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

# Daftar Pustaka

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2020). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Darwin, M. (2005). Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan. Benang Merah.
- Febrianti, T. (2017). Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan Di Wilayah Pesisir. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.25157/ma.v1i1.34>
- Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 158–169. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.28904>
- J Seabrook. (2006). Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme. Resist Book.
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 3(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i2.2161>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, IPEM4542/M*, 23–24.

- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardimin, J. (1996). *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Kanisius.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10(1), 1–11.
- Palikhah, N. (2017). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah*, 15(30), 1.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Prayitno, H., Arsyad, L. (1987). *Petani Desa dan Kemiskinan* Yogyakarta. BPFPE.
- Roostartina, E. (2013). Analisis Sosial Dan Ekonomi Kemiskinan di Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. *Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 20–33.
- Shaffer, P. (2008). New thinking on poverty: Implications for globalisation and poverty reduction strategies. *Real-World Economics Review*.
- Soetomo, D. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius.
- Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Alfabeta.

- Sukmawati, C., Murniati, M., & Ferizaldi, F. (2014). Model Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik di Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Transformasi Administrasi*.  
<http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/135%0Ahttp://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/135/75>
- Suparlan, P. (2000). *Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Sinar Harapan.

# BAB 05.

## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA DIGITAL

*-Tono Mahmudin-*

### **A. Peluang Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Teknologi digital memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh peluang yang dapat dimanfaatkan:

#### **1. Akses Informasi**

Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses pengetahuan, berita, dan informasi lainnya secara global (Hanum, 2013). Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai isu penting.

## **2. Pendidikan**

Teknologi digital membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh atau online. Ini memungkinkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus berpindah tempat. Selain itu, platform pembelajaran digital juga dapat menyediakan konten pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

## **3. Kewirausahaan**

Internet dan platform e-commerce memungkinkan masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri dengan lebih mudah. Masyarakat dapat menjual produk atau jasa mereka secara online, mengakses pasar global, dan memanfaatkan berbagai alat digital untuk mempromosikan bisnis mereka.

## **4. Kesehatan**

Teknologi digital telah mengubah cara pelayanan kesehatan disampaikan kepada masyarakat. Telemedicine memungkinkan konsultasi dokter jarak jauh, pengiriman obat secara online, dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses oleh fasilitas kesehatan tradisional.

## **5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Melalui teknologi digital, masyarakat lokal dapat membangun platform atau aplikasi untuk mempromosikan produk

lokal mereka. Ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan memperkuat ekonomi lokal.

## **6. Partisipasi Politik**

Media sosial dan platform online lainnya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, menyampaikan pendapat mereka, dan mengorganisir aksi kolektif. Hal ini memperkuat demokrasi partisipatif dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembentukan kebijakan.

## **B. Tantangan yang Dihadapi**

Tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merangkum serangkaian isu yang kompleks dan beragam, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari akses terhadap informasi hingga keamanan data. Kesenjangan dalam akses dan keterampilan, kekhawatiran akan privasi data, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta tantangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi merupakan beberapa dari tantangan utama yang perlu diatasi.

Penghadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa tantangan yang kompleks dan beragam, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara luas. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam akses dan keterampilan (Fahrezi *et al.*, 2022). Meskipun TIK telah memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya online, masih ada sebagian masyarakat yang

terpinggirkan karena kurangnya akses fisik maupun keterampilan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif.

Selanjutnya, kekhawatiran akan privasi data menjadi isu yang semakin mendesak dalam era digital ini. Dengan meningkatnya pengumpulan dan pertukaran data secara daring, keamanan dan privasi informasi pribadi menjadi perhatian utama. Perlindungan data yang kuat dan regulasi yang efektif menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan infrastruktur juga menjadi kendala yang signifikan, terutama di daerah terpencil atau berkembang. Keterbatasan akses terhadap jaringan internet yang stabil dan cepat dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pendidikan di daerah tersebut. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah ini menjadi sangat penting agar kesenjangan digital dapat dikurangi.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Transformasi digital dapat mengubah lanskap pekerjaan secara dramatis, dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan mengancam pekerjaan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran ini, termasuk pembelajaran dan pelatihan ulang untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang berubah.

Pentingnya penyelesaian tantangan-tantangan ini tidak bisa diabaikan, karena dampaknya dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Solusi yang efektif

memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan strategi yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan yang lebih baik tentang TIK dan literasi digital juga diperlukan agar individu dapat memanfaatkan potensi teknologi dengan bijaksana dan produktif.

## **C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

### **1. Inklusi Digital**

Memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi adalah prasyarat penting untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Di banyak negara, infrastruktur teknologi masih terkonsentrasi di perkotaan, meninggalkan daerah terpencil atau pedesaan tertinggal dalam hal akses internet dan layanan teknologi lainnya (Larasasati *and* Desy Natasya, 2017). Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang terjangkau dan tersedia di berbagai daerah menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam jaringan internet yang luas dan kuat, baik melalui kabel maupun nirkabel, serta penyediaan akses ke perangkat seperti komputer atau smartphone dengan harga terjangkau.

Penyediaan infrastruktur teknologi yang merata juga membuka pintu bagi peluang ekonomi dan pendidikan di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Dengan akses yang

memadai terhadap internet, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses peluang pendidikan jarak jauh, pelatihan online, dan pasar kerja global. Selain itu, infrastruktur teknologi yang merata juga memungkinkan para pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk mereka secara online dan mengakses pelanggan di luar daerah mereka, meningkatkan potensi ekonomi lokal.

Program subsidi atau insentif bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh akses ke perangkat dan layanan internet merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan inklusi digital yang lebih luas. Bagi sebagian masyarakat, biaya perangkat seperti komputer atau smartphone dan biaya langganan internet dapat menjadi hambatan utama dalam mengakses teknologi (Lestari, 2019). Dengan memberikan subsidi atau insentif, pemerintah atau organisasi terkait dapat membantu mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses perangkat dan layanan internet.

Program subsidi atau insentif juga dapat mendorong adopsi teknologi di kalangan masyarakat yang mungkin awalnya ragu atau tidak mampu membeli perangkat atau layanan internet. Dengan menawarkan bantuan finansial atau diskon, masyarakat yang kurang mampu dapat merasa lebih termotivasi untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, atau komunikasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses

mereka terhadap informasi dan peluang, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan digital yang ada.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) sangat penting dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan prioritas akses digital. Pemerintah memiliki akses ke data dan sumber daya yang diperlukan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di berbagai wilayah. Sementara itu, LSM sering memiliki kehadiran yang kuat di tingkat lokal dan pemahaman mendalam tentang tantangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan bekerja sama, pemerintah dan LSM dapat menggabungkan pengetahuan dan sumber daya mereka untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan akses digital lebih baik.

Setelah daerah-daerah yang membutuhkan prioritas akses digital diidentifikasi, pemerintah dan LSM dapat bersama-sama mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Ini bisa meliputi penyediaan infrastruktur internet yang lebih baik, subsidi perangkat atau layanan internet, atau program pelatihan literasi digital bagi masyarakat setempat. Dengan memahami konteks dan tantangan unik di setiap daerah, solusi yang dikembangkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses digital dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Literasi Digital**

Meningkatkan literasi digital masyarakat adalah langkah krusial dalam era di mana teknologi digital semakin men-

dominasi berbagai aspek kehidupan (Futum Hubaib, 2021). Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga pemahaman tentang etika online, privasi data, dan keamanan cyber. Program pelatihan dan pendidikan yang mencakup berbagai aspek literasi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman.

Program pelatihan literasi digital dapat mencakup berbagai topik, mulai dari dasar-dasar penggunaan komputer dan internet hingga keterampilan yang lebih canggih seperti penggunaan aplikasi produktivitas atau programming. Selain itu, program ini juga harus memasukkan aspek keamanan online, seperti cara mengenali phishing atau praktik *cyberbullying*, agar masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri dan informasi pribadi mereka saat berinteraksi online.

Sekolah menjadi tempat yang sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan literasi digital, karena pendidikan formal adalah fondasi utama bagi pengembangan keterampilan ini. Kurikulum sekolah dapat menyertakan pelajaran khusus tentang literasi digital, dan guru dapat melibatkan siswa dalam aktivitas yang memperkuat pemahaman mereka tentang teknologi. Selain itu, pusat komunitas dan lembaga non-pendidikan lainnya juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk menyelenggarakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum, termasuk orang dewasa yang mungkin tidak lagi berada di lingkungan pendidikan formal.

Pentingnya program pelatihan literasi digital juga terletak pada upaya mengurangi kesenjangan digital antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sering kali, kelompok-kelompok rentan seperti lansia, penduduk pedesaan, atau keluarga berpenghasilan rendah memiliki akses terbatas terhadap pelatihan literasi digital. Oleh karena itu, program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks khusus dari berbagai kelompok masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Selain memberikan pelatihan keterampilan praktis, program literasi digital juga harus memperkuat kesadaran tentang isu-isu penting seperti privasi data, keamanan online, dan dampak teknologi terhadap kesehatan mental (Dr. Joko *and* Dr. Budi Prijanto, S.E., M.M., 2023). Hal ini membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam penggunaan teknologi dan mencegah mereka jatuh ke dalam jebakan yang mungkin merugikan.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendukung program literasi digital dengan menyediakan dana, sumber daya, dan pedoman. Mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan bantuan teknis bagi penyelenggaraan program pelatihan.

Upaya untuk meningkatkan literasi digital juga dapat didorong oleh inisiatif swadaya masyarakat, baik dalam bentuk organisasi sukarela atau inisiatif komunitas yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan

melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran, program-program ini dapat lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, meningkatkan literasi digital masyarakat adalah investasi jangka panjang yang krusial dalam memastikan bahwa masyarakat dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini. Dengan menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang tepat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih terampil, cerdas, dan aman dalam menggunakan teknologi digital.

### **3. Kemitraan dan Kolaborasi**

Kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan LSM merupakan salah satu pendekatan terbaik untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat dalam era digital. Setiap pihak membawa keahlian, sumber daya, dan pengalaman yang berbeda, yang dapat digabungkan untuk menciptakan dampak yang lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri. Perusahaan teknologi, misalnya, memiliki sumber daya dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur digital yang kuat. Mereka dapat memberikan bantuan dalam penyediaan jaringan internet, perangkat, atau platform digital untuk masyarakat yang membutuhkan, baik melalui donasi langsung atau kemitraan dengan pemerintah dan LSM.

Sementara itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan kebijakan dan regulasi yang

mendukung inklusi digital (Judijanto *and* Afandy, 2024). Mereka dapat menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk investasi sektor swasta dalam infrastruktur teknologi, serta mengembangkan program subsidi atau insentif untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta dan LSM, memberikan dukungan administratif dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif bersama.

Kolaborasi antara berbagai pihak tidak hanya memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. LSM, dengan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bekerja langsung dengan masyarakat, dapat menjadi jembatan antara sektor swasta dan pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan. Mereka dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang di tingkat lokal, serta menyusun strategi yang relevan dan efektif dalam menanggapi masalah tersebut.

Pengembangan inisiatif bersama juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi tantangan bersama, seperti ketidaksetaraan akses digital, kurangnya literasi digital, dan ketidakamanan online. Dengan bekerja sama, mereka dapat menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka untuk mengembangkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Misalnya, mereka dapat menyelenggarakan program pelatihan literasi digital, membangun infrastruktur internet yang lebih

luas, atau mengembangkan kampanye kesadaran tentang keamanan online.

Namun, untuk mencapai hasil yang signifikan, kemitraan dan kolaborasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, saling menghormati, dan keseimbangan kepentingan (Irawan, 2024). Pihak-pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk bekerja sama secara transparan dan berbagi sumber daya dengan adil, serta menghormati hak-hak masyarakat yang mereka layani. Dengan demikian, kemitraan dan kolaborasi dapat menjadi alat yang kuat dalam membawa perubahan positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital.

## **D. Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat memerlukan langkah-langkah praktis yang terfokus pada adaptasi lokal dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:

### **1. Analisis Kebutuhan Lokal**

Analisis mendalam tentang kebutuhan dan tantangan masyarakat di tingkat lokal merupakan langkah krusial dalam merancang program pemberdayaan melalui teknologi digital yang efektif. Survei, wawancara, dan diskusi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah setempat, LSM, dan masyarakat umum memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal, kebutuhan spesifik, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Wibowo, 2022). Melalui interaksi langsung

dengan para pemangku kepentingan, kita dapat menggali informasi tentang infrastruktur teknologi yang ada, tingkat akses internet, tingkat literasi digital, serta tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan program pemberdayaan.

Pahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal juga penting dalam mengidentifikasi area-area prioritas untuk pemberdayaan melalui teknologi digital. Setiap komunitas memiliki karakteristik unik dan kebutuhan yang berbeda, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal membantu kita menyesuaikan solusi dengan baik. Misalnya, daerah yang kurang berkembang mungkin membutuhkan investasi infrastruktur digital yang lebih besar, sementara komunitas dengan tingkat literasi digital yang rendah memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih intensif. Dengan memahami secara holistik tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat lokal, kita dapat merancang program yang relevan, efektif, dan berkelanjutan untuk pemberdayaan melalui teknologi digital.

## **2. Kemitraan Lokal**

Membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak lokal adalah kunci dalam kesuksesan program pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Pemerintah setempat memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan prioritas lokal, serta kewenangan untuk menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung program tersebut. Komunitas merupakan jantung dari pemberdayaan masyarakat, dan

keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program adalah kunci untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, dapat memberikan wawasan tentang kurikulum yang tepat dan metode pembelajaran yang efektif, sementara sektor swasta dapat menyediakan sumber daya finansial, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung implementasi program dengan baik.

Dengan melibatkan pihak-pihak lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Ini memungkinkan kita untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat dan mengidentifikasi solusi yang paling relevan dan efektif. Selain itu, kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak lokal juga membantu membangun dukungan dan kepemilikan masyarakat terhadap program, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan jangka panjang. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat melalui pemberdayaan melalui teknologi digital.

### **3. Penyediaan Akses Digital**

Fokus pada penyediaan akses digital yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih maju secara teknologi. Pembangunan infrastruktur internet yang merata,

baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap dunia digital (Dewi *et al.*, 2021). Selain itu, penyediaan perangkat yang terjangkau juga menjadi kunci, karena perangkat seperti komputer atau smartphone adalah pintu gerbang utama untuk mengakses internet dan memanfaatkan teknologi digital. Program subsidi atau insentif bagi masyarakat yang kurang mampu adalah langkah proaktif untuk mengurangi kesenjangan akses digital, memastikan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan finansial juga dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. Penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti ketersediaan jaringan yang stabil dan harga yang terjangkau. Dengan pendekatan inklusif ini, diharapkan pemberdayaan melalui teknologi digital dapat menciptakan kesetaraan akses dan peluang bagi semua warga masyarakat.

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Program pendidikan dan pelatihan tentang literasi digital dan penggunaan teknologi merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Dengan menyelenggarakan program ini, kita dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, orang dewasa, dan kelompok rentan lainnya seperti

pengangguran atau kelompok berpenghasilan rendah (Fudzni and Aulia, 2021). Sasar program ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat setempat, sehingga materi yang diajarkan dapat relevan dan bermanfaat bagi peserta. Melibatkan guru, pengajar, dan pemimpin komunitas sebagai fasilitator adalah penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, serta memastikan bahwa peserta merasa didukung dalam proses pembelajaran mereka.

Dalam program pendidikan dan pelatihan, fokuslah tidak hanya pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pada literasi digital, keamanan online, dan etika digital. Ini akan membantu peserta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, sesuaikan program dengan kebutuhan khusus masyarakat setempat, seperti menekankan pada keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan bisnis di lingkungan lokal tertentu. Dengan demikian, program pendidikan dan pelatihan ini dapat menjadi alat yang kuat dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini.

## **5. Pengembangan Inisiatif Bersama**

Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah strategi yang kuat dalam mengembangkan inisiatif bersama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam

pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Dengan melibatkan pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, kita dapat memperoleh perspektif yang beragam dan menggabungkan keahlian serta sumber daya dari berbagai sektor. Fokusnya pada isu-isu seperti ketidaksetaraan akses digital, kurangnya literasi digital, dan ketidakamanan online memungkinkan kolaborator untuk menyatukan tenaga dan mengembangkan solusi yang holistik. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi unik mereka, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan yang mendukung, untuk membangun solusi yang berkelanjutan dan efektif.

Dalam upaya membangun solusi yang holistik dan berkelanjutan, penting untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing pihak yang terlibat. Misalnya, sektor swasta dapat menyediakan teknologi dan sumber daya finansial, sementara pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan. LSM dan akademisi dapat membawa pengetahuan mendalam tentang isu-isu sosial dan keahlian dalam pelaksanaan program. Dengan mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pihak, kita dapat mengembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital.

## **6. Evaluasi dan Pembelajaran**

Evaluasi dan pembelajaran merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan program pemberdayaan masya-

rakat melalui teknologi digital. Melalui evaluasi terus-menerus, kita dapat mengukur dampak program terhadap masyarakat serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan (Ina Magdalena, 2021). Evaluasi ini harus mencakup berbagai indikator, seperti tingkat akses dan pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi digital, dan perubahan perilaku yang diinginkan. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar, kita dapat belajar dari pengalaman yang telah dilalui dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi untuk mendapatkan umpan balik langsung dari peserta dan pemangku kepentingan lokal. Dengan melibatkan mereka, kita dapat memastikan bahwa evaluasi benar-benar mencerminkan pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap program. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi dan pembelajaran tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan program secara teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara penyelenggara program dan masyarakat yang dilayani.

# Daftar Pustaka

- Dewi, N. L. *et al.* (2021). 'Pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik berkelanjutan', *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), pp. 99–106. doi: 10.28932/jmm.v20i2.3024.
- Dr. Joko, M. P. and Dr. Budi Prijanto, S.E., M.M., M. S. (2023). *Kewirausahaan Digital, PT Mafy Media Literasi Indonesia*. Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Fahrezi, A. *et al.* (2022). 'Keamanan Data dan Transaksi dalam Pemanfaatan Cloud sebagai Service', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), pp. 5530–5536.
- Fudzni, E. H. and Aulia, S. S. (2021). 'Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn', *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), pp. 1–10. doi: 10.56393/didactica.v1i1.100.
- Futum Hubaib, J. B. A. J. dan (2021). 'KONSEP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)', *Dedikasi*, 22(2), p. 105. doi: 10.31293/ddk.v22i2.5860.
- Hanum, N. S. (2013). 'Keefetifan e-learning sebagai media pembelajaran (studi evaluasi model pembelajaran e-learning SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto)', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(1), pp. 90–102. doi: 10.21831/jpv.v3i1.1584.

- Ina Magdalena. (2021). 'Keefektifan Model Desain Pembelajaran Kreatif-Inovatif dan Pengaruh Pelaksanaan Evaluasi Formatif', *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(1), pp. 58-74. Available at: <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/993>.
- Irawan, B. (2024). *Tata Kelola Sektor Publik*. Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Judijanto, L. and Afandy, C. (2024). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Larasasati, C. and Desy Natasya, E. (2017). 'Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, (2), pp. 147-160. Available at: [www.presidenri](http://www.presidenri).
- Lestari, R. A. (2019). 'Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). doi: 10.33005/jdg.v9i1.1421.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Available at: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/173>.

# ***Tentang Penulis***



***Eka Yuliana Rahman, S.Pd., M.Pd.***

Dosen Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Manado

Penulis lahir di Jeneponto, 02 Januari 1988 Sulawesi Selatan. Penulis adalah dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah UNM dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sejarah UNM. Penulis telah aktif pada berbagai pemberdayaan masyarakat secara langsung dan terlibat pada Non Governmental Organization. Sejumlah

penelitian dan buku telah ditulis dengan terkait bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.



***Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si.***

Dosen Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh

Penulis lahir di Bayur Sumbar tanggal 29 Mei 1977. Penulis adalah dosen pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Manajemen di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan melanjutkan S2 pada program studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Andalas, Padang, dan S3 pada Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan tema Manajemen Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Kebijakan Publik.



***Dr. Istiana Hermawati, S.Pd., M.Sos.***

Peneliti Ahli Utama

Pusat Riset Kebijakan Publik

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Penulis lahir di Jepara tanggal 14 Oktober 1969. Penulis adalah Peneliti Ahli Utama Pada Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dosen tetap dengan status NIDK pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah di IKIP Yogyakarta, Lulus Tahun 1993, Menempuh S2 pada Prodi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Lulus Tahun 2003 dan melanjutkan S3 pada Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Konsentrasi Metodologi Penelitian pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Lulus Tahun 2011.

Penulis menekuni bidang Penelitian, Pengajaran dan pemberdayaan Masyarakat. Karya tulis yang dihasilkan terkait

Bidang Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Isue Perempuan, Anak dan Kelompok Minoritas, Evaluasi Program serta Metodologi Penelitian.



***Dr. Lumastari Ajeng Wijayanti, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.***

Dosen Poltekkes Kemenkes Malang

Prodi STr. Kebidanan Kediri

Penulis lahir di Nganjuk tanggal 16 Desember 1961. Penulis adalah dosen pada Program Studi STr. Kebidanan Kediri Poltekkes Kemenkes Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Keperawatan UNPAD Bandung, dan melanjutkan S2+ Spesialis Maternitas pada Universitas Indonesia kemudian melanjutkan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menekuni bidang penelitian dan sudah pernah publish di Jurnal Nasional Peringkat 2, 3 dan 4, serta di jurnal Internasional, Jurnal bereputasi Scopus 3 dan 4.



***Dr. (Cand). Tono Mahmudin, S.E., M.Sc.***

Dosen Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM Ambon

Penulis lahir di Ciamis, tanggal 06 Juli 1971. Penulis adalah dosen Lldikti Wilayah XII Dpk pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Menyelesaikan pendidikan S1 (1998) Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM Ambon, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S-2 (2009) pada Program Magister Sains & Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dengan minat/konsentrasi Ekonomi Moneter. Dan sementara ini sedang menyelesaikan Studi S3 pada Program Studi

Ilmu Kelautan Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon dengan minat/konsentrasi Agribisnis Perikanan.